

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF
TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014
ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh:

REZA GURUH MAULANI

NPM. 18.81.0453

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

Reza Guruh Maulani. 18.81.0453.
2022. *Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. Maksun, S.H., M.H, Pembimbing II Dr. Indah Dewi Megasari, S.H.I., M.H.I

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Kekerasan pada Anak, Perlindungan Anak*

Tingginya angka tindak pidana kekerasan pada anak-anak perlu mendapat perhatian dari semua pihak, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun data dan fakta di lapangan masih terus menunjukkan tren peningkatan, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik sekitar 18 persen. Kekerasan jenis lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain, setiap tahun terus mengalami kenaikan secara signifikan sebagaimana data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada akhir bulan Nopember 2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*), dan studi dokumenter yaitu mempelajari dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penulisan skripsi.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk

k memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan.

ABSTRACT

Reza Guru Maulani. 18.81.0453. 2022. *Normative Juridical Review of Crimes of Violence against Children Reviewed from Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.* Thesis of the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I Dr. H. Maksum, S.H., M.H, Supervisor II Dr. Indah Dewi Megasari, S.H.I., M.H.I

Keywords: *Crime, Violence against Children, Child Protection*

The high number of crimes of violence against children needs attention from all parties, various efforts have been made by the government but data and facts on the ground still continue to show an increasing trend, the most experienced cases were sexual violence at 45 percent, psychic violence at 19 percent, and physical violence at about 18 percent. Other types of violence against children in the form of neglect, trafficking, economic exploitation, and others, every year continue to increase significantly as per data released by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) at the end of November 2021.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods, and documentary studies, namely studying documents related to problems related to thesis writing.

The results of this study examine the Regulation on Crimes of Violence against Children in Law Number 35 of 2014 on the Amendment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the protection of Children carried out so far has not provided guarantees for children to get treatment and opportunities that are in accordance with their needs in various fields of life, so that in carrying out efforts to protect the Rights of the Child by the Government must be based on the principle of human rights, namely respect, fulfillment, and protection of the Rights of the Child. Sanctions for Perpetrators of Crimes of Violence against Children in Law Number 35 of 2014 for Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, is to emphasize the need to impose criminal sanctions and fines for perpetrators of crimes against children, to provide a deterrent effect, and encourage concrete steps to restore the physical, psychological and social reinstatement of child victims and /or children of perpetrators of crimes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2002. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta

Bambang Purnomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Barker Robert, 1987. *The Social Work Dictionary*

Moeljatno 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group

Pasek Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media Group Jakarta

Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achjani, 2009. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial anak* Jakarta: Prenada Media Group

Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya

Website

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 9 Pebruari 2022.

Wikipedia, Kekerasan. [http:// id.wikipedia.org/wiki/kekerasan](http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan) diakses pada tgl 11 Maret 2022.

KPAI, Update Infografis

KPAI <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia